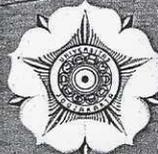
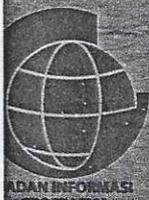


ISBN 978-602-18999-3-9

# PROSEDING SEMNAS DAN PIT IGI XVII

JAKARTA 23-25 OKTOBER 2015

**GEO MARITIM :**  
**UPAYA MEWUJUDKAN POROS MARITIM  
DUNIA DALAM PERSPEKTIF  
GEOGRAFI**



# PEMODELAN KOTA PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR

**Siti Fadjarajani**

Program Studi Pendidikan Geografi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Siliwangi Tasikmalaya

## ABSTRAK

*Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Wilayah dapat berbentuk formal atau fungsional berdasarkan kriteria tunggal atau kriteria jamak. Kawasan perbatasan sangat terkait dengan kondisi fisik wilayah yang relatif terbelakang, pergerakan barang dan manusia yang intensif, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Untuk itu, wilayah perbatasan membutuhkan suatu model pembangunan wilayah atau pembangunan kota perbatasan yang bisa dijadikan acuan bagi pengembangan kota-kota lainnya.*

*Kajian isu strategis pengelolaan kawasan perbatasan menyangkut telaah terhadap kebijakan yang ada. Lingkup kajian isu lingkungan strategi yang perlu dikaji meliputi; lingkungan strategis global, lingkungan strategis regional, lingkungan strategis nasional dan lingkungan strategis lokal. Kawasan perbatasan merupakan bagian integral dari wilayah provinsi/ kabupaten pada khususnya dan wilayah nasional pada umumnya maka penanganannya memerlukan hirarki kelembagaan sesuai urgensinya.*

*Analisis data yang dilakukan meliputi : Analisis kebijakan, Analisis ekonomi, Analisis Positioning, dan Analisis geo-spasial. Penyusunan model kota perbatasan dilakukan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Motaain, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.*

*Program penanganan kawasan perbatasan dirumuskan untuk mewujudkan konsepsi penanganan kawasan perbatasan dan disinkronkan dengan Program Pembangunan Nasional yang merupakan acuan pembangunan nasional sehingga program yang dirumuskan bersifat komprehensif dan terarah. Dua program nasional yang terkait langsung dengan penanganan wilayah perbatasan yaitu: 1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. 2) Program pembangunan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Prasarana*

**Kata Kunci : Pemodelan, Pembangunan Wilayah, Perbatasan**

## A. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan Negara, berarti melakukan pembangunan wilayah dengan cara-cara yang benar, dilakukan berdasarkan pada suatu hasil penelitian yang dilakukan dengan baik. Yaitu penelitian yang dapat memahami tidak saja permasalahan pembangunan di wilayah perbatasan tetapi sekaligus yang bisa melihatnya dari sisi lain secara lebih terpadu dan menyeluruh. Pengembangan kawasan perbatasan yang terpadu dan menyeluruh

seharusnya didukung oleh infrastruktur yang handal. Tanpa perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang dapat menjangkau wilayah perbatasan, mustahil fungsi optimal sebuah kawasan perbatasan sebagai beranda negara dapat ditangani dengan baik.

Untuk itu, wilayah perbatasan itu sendiri membutuhkan model tentang pembangunan wilayah atau pembangunan kota perbatasan yang bisa dijadikan acuan bagi pengembangan kota-kota lainnya. Hal ini karena kawasan perbatasan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan wilayah lainnya. Kawasan perbatasan sangat terkait dengan kondisi fisik wilayah yang relatif terbelakang, pergerakan barang dan manusia yang intensif, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Tipologi kawasan perbatasan seperti itu memerlukan model dan pendekatan yang berbeda pula dalam penanganannya. Dalam konteks seperti ini, maka tidaklah berlebihan bila untuk pengembangan Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Motaain Kabupaten Belu Provinsi NTT ke depan dapat dijadikan sebagai model kota perbatasan.

Untuk penyusunan model kota perbatasan dinilai sesuai mengambil kasus Kecamatan Entikong, mengingat peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dimiliki oleh Entikong. Kawasan ini merupakan kawasan perbatasan yang paling tinggi aktivitas ekonominya di sepanjang Kalimantan Barat–Sarawak. Aktivitas ekonomi tersebut sebagian besar adalah sektor perdagangan yang tumbuh akibat terbukanya pintu lintas batas formal Entikong–Tebedu (Sarawak) sejak tahun 1991. Sebagai pintu lintas batas, kawasan ini menjadi pintu masuk dan pintu keluar bagi arus perdagangan yang terjadi antar wilayah, serta menjadi lokasi yang strategis bagi kegiatan perekonomian.

Posisi Entikong yang strategis dan adanya akses formal perbatasan menyebabkan pergerakan komoditas barang dan manusia mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada arus masuk maupun yang keluar. Dari sisi pergerakan manusia, cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata arus masuk lebih tinggi dari arus keluar. Peningkatan pergerakan disebabkan oleh berubahnya fungsi pos pelintas batas yang tidak hanya dilalui oleh pelintas tradisional tetapi disebabkan pula oleh pelintas non tradisional.

Sementara itu, Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah yang terletak di wilayah perbatasan dengan Negara Timor Leste, dimana di sebelah utaranya berbatasan dengan selat Ombai, di selatan dengan Laut Timor dan Kab. Timor Tengah Selatan, di sebelah barat dengan Kab. Timor Tengah Utara, dan disebelah timur dengan Negara Timor Leste. Kabupaten Belu juga menjadi salah satu prioritas lokasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan.

## **b. Permasalahan**

kawasan perbatasan antar negara juga memiliki potensi strategis bagi pengembangan kegiatan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan maupun perdagangan internasional. Oleh karena itu kawasan perbatasan berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama dalam hal pengembangan industri jasa dan perdagangan.

Pengembangan kota perbatasan ini harus memperhatikan *ASEAN Economic Community* (AEC) yang disepakati dalam KTT ASEAN di Cebu City, Filipina. Dalam konteks ekonomi regional, berdasar kesepakatan AEC tersebut pada tahun 2015 ditargetkan pencapaian tujuan integrasi ekonomi regional ASEAN yang menggambarkan karakteristik basis produksi dan pasar tunggal, ekonomi regional yang sangat kompetitif, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Kerjasama ASEAN Economic Community mencakup:

- a. Pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia;
- b. Pengakuan kualifikasi profesional;
- c. Konsultasi ketat tentang makro ekonomi dan kebijakan finansial;
- d. Upaya-upaya pembiayaan perdagangan;
- e. Peningkatan konektivitas infrastruktur dan komunikasi;
- f. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
- g. Integrasi industri lintas Negara untuk mempromosikan sumber daya regional;
- h. Peningkatan pelibatan sektor privat untuk pengembangan ASEAN *Economic Community*.

Singkatnya, *ASEAN Economic Community* akan mentransformasikan negara-negara ASEAN menjadi satu kawasan dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Dengan demikian kota-kota perbatasan yang akan berkembang harus dapat menyelaraskan diri dengan perkembangan regional tersebut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik.

### c. Tujuan

Tujuan dari penelitian adalah mengembangkan model kota perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan Kec. Motaain dan Kec. Motamasin, Kab. Belu dan Kab. Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan dalam penyusunan laporan model kota perbatasan beberapa sasaran yang akan dilakukan, antara lain:

- a. Tersusunnya model pertumbuhan kota vertikal dengan pertimbangan optimasi perubahan tata guna lahan;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan kota Kecamatan;
- c. Tersusunnya rancang bangun kota perbatasan

## B. METODOLOGI

Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencakup:

1. Kajian isu strategis pengelolaan kawasan perbatasan;
2. Kajian lingkungan strategis;
3. Kajian literatur mencakup; Rencana Aksi, Rencana Induk, Desain Besar BNPP, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, RPJMN, dan RPJPN yang mengarah pada pentingnya suatu model kota perbatasan;
4. Survey lapangan;
5. Melakukan analisis kebijakan, geo-spasial, ekonomi dan sistem kota-kota terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan.
6. Penyusunan model kota perbatasan;
7. Pengujian Model Kota Perbatasan.

Adapun Kegiatan analisis yang dilakukan adalah : Analisis kebijakan, Analisis geo-spasial, Analisis ekonomi, Analisis kedudukan wilayah perencanaan, dan Pemodelan Kota Perbatasan dengan pendekatan Model Konseptual yang didukung dengan landasan teori.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Potensi dan Permasalahan Kewilayahan

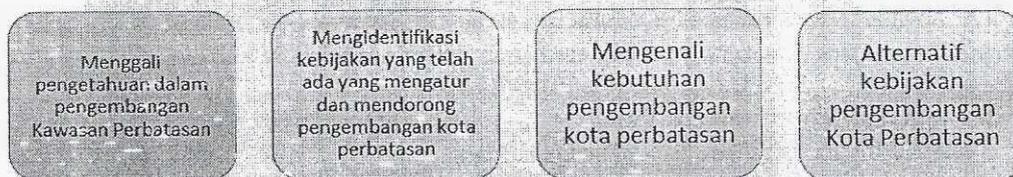
Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis bagi suatu Negara dalam mendukung keberhasilan pembangunan, hal tersebut di karenakan kawasan perbatasan merupakan representative nilai kedaulatan suatu Negara, bermula dari kawasan perbatasan akan mendorong perkembangan ekonomi, social budaya dan kegiatan masyarakat lainnya yang akan saling mempengaruhi antara Negara, sehingga berdampak pada strategi kemandirian dan pertahanan Negara. Kawasan perbatasan suatu Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah Negara, Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (a) Penetapan garis batas baik di darat mau pun laut; (b) Pengamanan kawasan perbatasan; dan (c) Pengembangan kawasan perbatasan.

#### a. Isu Ekonomi dan Sosial Budaya

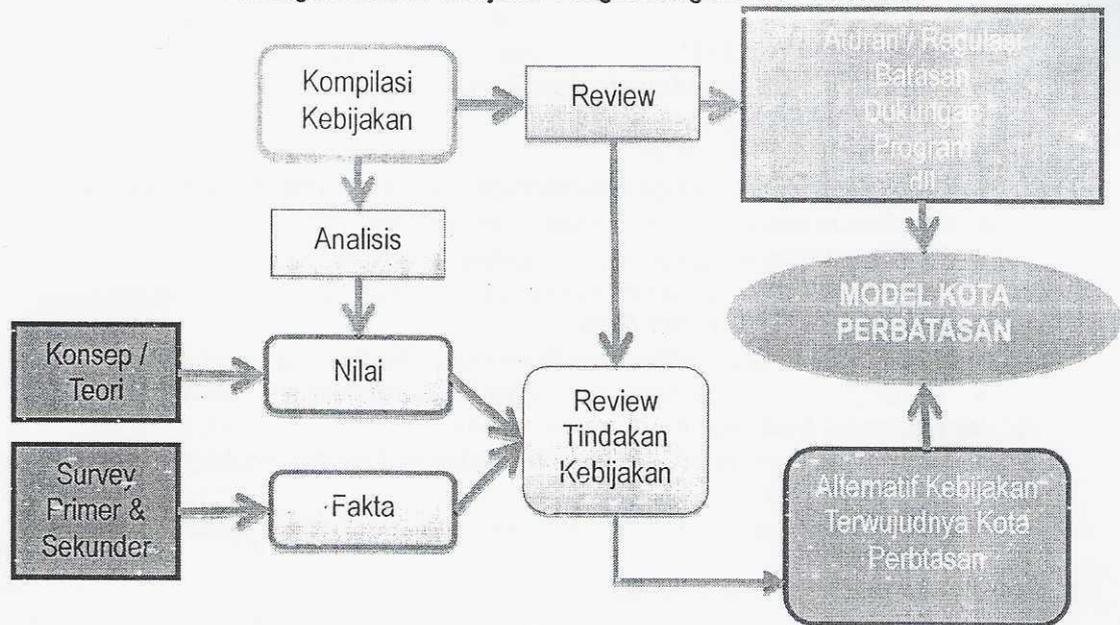
- Adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai halaman belakang
- Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga
- Sarana dan prasarana masih minim
- Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera

- Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan
  - Rendahnya kualitas SDM
  - Adanya aktivitas pelintas batas tradisional
  - Adanya tanah adat/ulayat masyarakat
- b. Isu Pertahanan dan Keamanan**
- Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh
  - Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana
  - Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum
  - Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS)
- c. Isu Pengelolaan Sumber Daya Alam**
- Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam belum optimal
  - Terjadinya eksploitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terkendali dan berkelanjutan
- d. Isu Kerjasama Antarnegara**
- Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub regional, maupun regional
  - Belum optimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan
- 2. Analisis Kebijakan Model Kota Perbatasan**

**Gambar 1. Kerangka Analisis Kebijakan Pengembangan Kota Perbatasan**



Gambar 2. Kerangka Analisis Kebijakan Pengembangan Kota Perbatasan



### 3. Dinamika Permasalahan Kawasan Perbatasan

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya, seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu:

1. Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut
2. Pengamanan kawasan perbatasan
3. Pengembangan kawasan perbatasan.

Penanganan berbagai permasalahan pada tiga isu utama tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan. Karena terabaikan untuk kurun waktu yang lama, kawasan perbatasan di Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai tempat lalu-lalangnya masalah tenaga kerja ilegal (*illegal workers*), pembalakan dan penggundulan hutan (*illegal logging*), serta penyelundupan (*smuggling*). Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat isolasi wilayah, menyebabkan kawasan ini dapat menjadi jalan masuk bagi larinya teroris yang mengkhawatirkan dunia internasional (*transnational-terrorists*).

Kawasan perbatasan biasanya menjadi agenda utama dalam pembahasan dan pembicaraan misalnya ketika keputusan Mahkamah Internasional mengenai Pulau Sipadan – Ligitan menempatkan Indonesia pada posisi yang "kalah." Kekalahan ini mendorong semakin tingginya intensitas perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pengembangan, penataan dan pemberdayaan kawasan perbatasan. Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan pada umumnya meliputi:

1. Belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas, baik garis batas laut maupun garis batas darat, serta administrasi dan pemeliharannya. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah

perbatasan menjadi terkendala. Adanya permasalahan batas negara ini banyak menimbulkan dampak negatif dan berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan.

2. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir.
3. Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ/Custom, Imigration and Quarantina) tidak optimal dan terkendala banyak hal, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kegiatan ilegal lintas batas.
4. Belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut kelembagaan, program, maupun kejelasan wewenang.
5. Adanya kegiatan penyelundupan barang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Rentannya persoalan yang terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia, dan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga daripada negara sendiri.

Tabel 1. Matriks Nilai, Fakta Dan Tindakan Kebijakan Dalam Pengembangan Kota Perbatasan

No	Nilai	Fakta dan Tindakan Kebijakan	Kebutuhan Kebijakan Pengembangan Kota Perbatasan
1.	Pertahanan keamanan negara	Masih terjadi masalah tenaga kerja ilegal (illegal workers), pembalakan dan penggundulan hutan (illegal logging), serta penyelundupan (smuggling)	Kebijakan yang mendorong tersedianya infrastruktur dan sarana pertahanan dan keamanan
2.	Batas wilayah negara	Masih terjadi sengketa perbatasan.	Kebijakan batas negara
3.	Ekonomi kawasan	Terhadap Negara Malaysia Indonesia masih tertinggal.  Terhadap RDTL Indonesia masih lebih baik, meski khusus di kawasan perbatasan Indonesia tertinggal.	Kebijakan mendorong orientasi perekonomian yang maju dan berdaya saing
4.	Pelayanan infrastruktur dan sosial dasar	Masih perlu peningkatan terutama di kawasan perbatasan.	Kebijakan percepatan peningkatan infrastruktur di kawasan perbatasan
5.	Kapasitas kelembagaan	Belum memadai terasuk sarana prasarananya	Kebijakan mendorong dan menyediakan sarana dan SDM di kawasan perbatasan
6.	Nasionalisme / integritas kebangsaan	Masyarakat belum menjunjung tinggi nasionalisme	Kebijakan yang terintegrasi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan nasionalisme
7.	Kerjasama antarnegara	Belum terbangun	Kebijakan Kerjasama Luar negeri dengan lebih besar pemihakan kepada Republik Indonesia

#### 4. Konsep Pengembangan Ekonomi Model Kota Perbatasan

Konsep pengembangan ekonomi yang diterapkan pada Model Kota Perbatasan secara umum dilatarbelakangi oleh keragaman dan kondisi kemajuan daerah, bentang Indonesia yang luas, serta pelaksanaan pembangunan yang top down dan seragam yang mengakibatkan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Selain itu, adanya keterbatasan pemerintah pusat dalam kendali sumberdaya untuk menjangkau kawasan perbatasan yang secara umum berada di daerah terisolir.

Konsep yang selama ini berkembang adalah pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*) yang banyak menutup peluang pengembangan potensi ekonomi lokal, sehingga usaha-usaha kecil di daerah pinggiran tidak diperhatikan. Oleh karena itu diperlukan pembangunan yang tidak seragam dan memperhatikan kekhasan lokal, perlu konsep Pembangunan Ekonomi Lokal = PEL.

Pengertian PEL merupakan bagian dari pembangunan daerah, fokus pada pembangunan daerah yang memperhatikan kekhasan, keberagaman, keunggulan dan potensi daerah. Menurut World Bank, PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

##### Kecamatan Entikong

Konsep pengembangan ekonomi untuk Kecamatan Entikong tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian, SDA, dan lingkungan hidup di daerah tersebut. Secara umum (Entikong termasuk di dalamnya) kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terutama pada sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan (sawit, karet, dan kakao). Sektor lainnya yang dominan adalah perdagangan dan industri. Karakteristik khas dari kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan darat RI-Malaysia di Kalimantan adalah adanya perdagangan lintas batas Negara yang didasarkan atas pengaturan lintas batas (*Border Crossing Agreement/BCA*) dan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement/BTA*).

BCA antara Indonesia-Malaysia ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1967 dan diperbaharui pada 12 Januari 2006, sedangkan BTA antar kedua negara disahkan pada tanggal 24 Agustus 1970. Jenis barang yang diizinkan untuk diperdagangkan dari wilayah Indonesia adalah hasil pertanian dan hasil lainnya yang berasal dari daerah perbatasan (tidak termasuk minyak, mineral, dan barang tambang) sedangkan barang-barang dari Malaysia berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang perlengkapan industri. Nilai limit transaksi untuk perdagangan lintas batas darat Indonesia-Malaysia adalah sebesar RM 600/bulan/orang. Perdagangan lintas batas tidak hanya mempedagangkan produk dari daerah perbatasan saja namun meliputi juga berbagai produk hasil dari daerah di luar kawasan perbatasan. Perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan RI-Malaysia dewasa ini cukup besar jika dilihat dari volume maupun nilainya, sehingga mendorong kawasan perlintasan batas sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, misalnya di Entikong. Potensi perdagangan cukup besar karena adanya permintaan barang dan jasa yang tinggi dari wilayah di kedua Negara. Namun karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, potensi tersebut tidak dapat dinikmati sepenuhnya sebagai pendapatan negara atau daerah karena banyak perdagangan yang bersifat illegal.

##### Kecamatan Tasifeto Timur dan Kobalima Timur

Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan RI-Timor Leste didominasi oleh pertanian lahan kering dan perkebunan. Beberapa komoditas yang dihasilkan antara lain jambu mete, kopi, kelapa, kemiri, coklat, pinang, kapuk, cengkeh, tembakau, vanili jarak, kapas, lada dan pala. Aktivitas ekonomi yang khas